



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Desliana
Jabatan : Plt. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Hasto Wardoyo
Jabatan : Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palembang, 22 Desember 2021

Pihak Kedua,

Hasto Wardoyo

Pihak Pertama,



Desliana

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SUMATERA SELATAN**

NO	SASARAN KINERJA	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Menurunnya angka kelahiran total	1	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	2,09 Rata-rata anak per Wanita
2	Meningkatnya angka prevalensi kontrasepsi modern	1	Angka prevalensi kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalance Rate/mCPR)	55,17 %
3	Menurunnya kebutuhan ber-KB yg tidak terpenuhi	1	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	11,49 %
4	Menurunnya angka kelahiran remaja	1	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	22 Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun
5	Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga	1	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	54,38 (Skala 0-100)
6	Meningkatnya Median Usia Kawin Pertama Perempuan	1	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	21 Tahun
7	Meningkatnya Pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana diseluruh tingkatan wilayah	1	Jumlah keluarga yang melaksanakan pengasuhan dan pendampingan pembentukan karakter	87.069 Keluarga
		2	Jumlah PIK Remaja dan BKR yang mendapat pembinaan GenRe	718 PIK Remaja & 547 BKR)
		3	Jumlah Keluarga yang mengakses PPKS	1.633 Keluarga
		4	Persentase Kabupaten/kota yang melaksanakan kegiatan usaha ekonomi keluarga	80 %
		5	Jumlah Pemerintah Daerah yang memanfaatkan GDPK dalam penetapan parameter kependudukan pada perencanaan pembangunan daerah	1 Prov & 5 Kab/Kota
		6	Jumlah Rumah Data Kependudukan Paripurna yang terbentuk di Kampung KB	201 Rumah Data Kependudukan Paripurna di Kampung KB
		7	Jumlah Kelompok Kerja Bangga Kencana Provinsi dan Kab/Kota yang efektif	1 prov & 5 kab/kota
		8	Cakupan implementasi pendidikan kependudukan di provinsi	3 Jalur (formal, nonformal, dan informal)
		9	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk	1 prov & 5 kab/kota
		10	Jumlah Kampung KB yang melaksanakan penanganan terpadu isu kependudukan	290 Kampung KB
		11	Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	55,41 %
		12	Indeks Informasi Metode KB (Method Information Index/MII)	75,76 (Skala 0-100)
		13	Persentase kesertaan KB di Kabupaten/Kota dengan kesertaan rendah	60,13 % peserta KB
		14	Persentase Kehamilan Yang Tidak Diinginkan	9,10 %
		15	Persentase Pelayanan KB Pascapersalinan	44,6 %
		16	Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja yang berperan serta aktif dalam pengelolaan Program Bangga Kencana	22 Stakeholder/ Mitra
		17	Persentase masyarakat yang terjangkau Program Bangga Kencana	65 %
		18	Persentase Penyuluh KB yang berkinerja baik	70 %
		19	Jumlah pengelolaan Sistem Informasi Keluarga (SIGA)	17 Kab/Kota
		20	Persentase cakupan perangkat dan jaringan sistem Teknologi dan Informasi di Tk. Provinsi dan Kabupaten/Kota	100 % Wilayah Prov dan Kab/Kota
		21	Jumlah pemerintah daerah yang mendapatkan fasilitasi penetapan data parameter pembangunan Keluarga, kependudukan dan Keluarga berencana untuk perencanaan dan evaluasi daerah pembangunan.	1 prov & 6 Kab/kota

NO	SASARAN KINERJA	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		22	Jumlah Keluarga dengan baduta yang mendapatkan fasilitas pembinaan 1000 HPK	228.286 Keluarga
		23	Jumlah PIK Remaja dan BKR yang mendapat fasilitas pembinaan Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu	1.265 PIK Remaja dan BKR
		24	Jumlah Kelompok BKL yang mendapat fasilitas pembinaan Pelayanan Ramah Lansia	262 Kelompok BKL
		25	Jumlah Kelompok UPPKA percontohan di Kampung KB yang mendapat fasilitas dan pembinaan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	51 Kelompok UPPKA
		26	Jumlah Rumah data kependudukan paripurna di kampung KB yang mendapat fasilitas pembinaan	56 Kampung KB
		27	Kampung KB yang mendapat fasilitas Intensifikasi dan Ekstentifikasi kegiatan Bangga Kencana	17 Kab/Kota
		28	Jumlah Faskes yang mendapat pemenuhan ketersediaan Alokasi	734 Faskes
		29	Kampung KB yang mendapat fasilitas pemberdayaan dalam rangka penurunan stunting	17 Kab/Kota
		30	Jumlah Rekomendasi kebijakan hasil Studi Kasus Stunting provinsi	2 Rekomendasi kebijakan
		31	Pelaksanaan layanan Audit Stunting, Manajemen Kasus Stunting Kab/Kota, dan koordinasi Intensifikasi pelayanan KB di faskes	17 Kab/Kota
		32	Jumlah Penyelenggaraan koordinasi satgas Percepatan Penurunan Stunting Provinsi dan kab/kota	18 kegiatan
		33	Jumlah Data kasus stunting dan keluarga resiko stunting yang terverifikasi	1 layanan (513 Kampung KB)
		34	Jumlah Kampanye Percepatan Penurunan Stunting tingkat Provinsi dan kab/kota yang dilaksanakan	1 layanan (6 Kegiatan)
		35	Jumlah Layanan Pemutakhiran basis data keluarga Indonesia (PBDKI)	1 Layanan (17 Kab/Kota)
8	Meningkatnya penyelenggaraan kegiatan pelatihan, penelitian dan pengembangan di Provinsi	1	Persentase peserta Diklat yang lulus dengan kategori baik dan sangat baik	65%
		2	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana yang digunakan sebagai input rumusan Kebijakan Program Bangga Kencana di Provinsi	1 Laporan
		3	Jumlah SDM eksternal yang mendapatkan Pelatihan dan Refreshing dalam rangka percepatan penurunan stunting	18.393 Orang
9	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan manajemen dalam pengelolaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana di Provinsi	1	Dukungan Manajemen di Provinsi (termasuk gaji/001 dan pemeliharaan rutin/002)	12 Bulan
		2	Jumlah kegiatan penyelenggaraan sekretariat percepatan penurunan stunting provinsi	1 kegiatan
		3	Jumlah layanan humas percepatan penurunan stunting tingkat provinsi	1 layanan
10	Mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan pengawasan lainnya di provinsi	1	Indeks ZI WBK	79 (Skala 1-100)
		2	Jumlah Layanan Pengawasan Kegiatan Percepatan Penurunan Stunting tk provinsi	1 layanan

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Pengelolaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana Perwakilan BKKBN Provinsi	42.364.796.000
2	Pelaksanaan Dukungan Manajemen di Perwakilan BKKBN Provinsi	72.785.432.000
TOTAL ANGGARAN		115.150.228.000

Kepala Badan Kependudukan
Dan Keluarga Berencana Nasional,



Hasto Wardoyo

Palembang, 22 Desember 2021

Kepala Perwakilan BKKBN
Provinsi Sumatera Selatan,



Desliana

LAMPIRAN DEFINISI OPERASIONAL PERWAKILAN BKKBN PROVINSI

NO	SASARAN KINERJA	NO	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Penjelasan Definisi Umum	Rumus Perhitungan Indikator Kinerja	Periode Waktu Pengukuran Indikator Kinerja	SUMBER DATA PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN	UNIT KERJA SUMBER DATA PENANGGUNG JAWAB PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA
1	Menurunnya angka kelahiran total	1	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	Rata-rata anak per Wanita	1. Rata – rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya (15-49 tahun) sumber: BPS, Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa) 2. Jumlah anak yang akan dilahirkan oleh seorang wanita sampai akhir masa reproduksinya jika dapat melampaui masa melahirkan anak dengan mengikuti pola ASFR saat ini (SDKI 2007, pp.49)	Rata – rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya (15-49 tahun) $TFR = 5 \times \sum_{i=15-19}^{45-49} ASFR_i$ i : Kelompok usia 15-19 tahun, 20-24 tahun,.... 45-49 tahun; ASFR _i : ASFR untuk wanita kelompok usia ke-i	Tahunan	Pendataan Keluarga/SDKI	Pendataan Keluarga dan SDKI dilaksanakan 5 tahunan (Updating PBDKI setiap tahun)	DALDUK
2	Meningkatnya angka prevalensi kontrasepsi modern	1	Angka prevalensi kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalance Rate/mCPR)	Persen	Persentase wanita kawin usia 15-49 tahun yang menggunakan kontrasepsi modern pada saat pengamatan. Adapun kontrasepsi modern terdiri dari peserta KB IUD, Implant, MOP, MOW, Suntik, Pili, Kondom dan MAL	Banyaknya peserta KB aktif modern dibagi dengan banyaknya Pasangan Usia Subur (PUS). $mCPR = \frac{\sum PA\ Modern}{\sum PUS} \times 100\%$ Keterangan PA Modern : Peserta KB Aktif modern PUS : Pasangan Usia Subur usia 15 – 49 tahun	Tahunan/ Bulanan	Pendataan Keluarga/SDKI Statistik Rutin	Pendataan Keluarga dan SDKI dilaksanakan 5 tahunan (Updating PBDKI setiap tahun)	KBKR
3	Menurunnya kebutuhan ber-KB yg tidak terpenuhi	1	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	Persen	1. Persentase PUS yang tidak ingin mempunyai anak lagi atau ingin menjarangkan kelahiran berikutnya, tetapi tidak memakai alat/cara KB (Statistik Rutin) 2. Wanita usia subur yang tidak menggunakan alat/cara kontrasepsi namun menginginkan penundaan kehamilan (perjarangan) atau berhenti sama sekali (pembatasan) SDKI 2007, pp.98)	Formula Statistik Rutin: $\frac{PUS\ Bukan\ Peserta\ KB}{(IAT+TIAL)} \times 100\%$ Keterangan IAT : Ingin Anak Ditunda (Perjarangan) TIAL : Tidak Ingin Anak Lagi (Pembatasan) Total PUS : Jumlah Seluruh PUS	Tahunan/ Bulanan	Pendataan Keluarga/SDKI Statistik Rutin	Pendataan Keluarga dan SDKI dilaksanakan 5 tahunan (Updating PBDKI setiap tahun)	ADPIN
4	Menurunnya angka kelahiran remaja	1	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun	Angka kelahiran selama setahun per 1000 wanita pada kelompok umur 15-19 Tahun. Angka ini dapat digunakan untuk membedakan fertilitas umur muda	Formula ASFR 15-19 Tahun : $ASFR_{15-19} = \frac{K_{15-19}}{P_{15-19}} \times 1000$ P ₁₅₋₁₉ : jumlah perempuan pada kelompok umur 15-19 tahun; K ₁₅₋₁₉ : jumlah kelahiran pada kelompok umur 15-19 tahun	Tahunan	Pendataan Keluarga/SDKI	Pendataan Keluarga dan SDKI dilaksanakan 5 tahunan (Updating PBDKI setiap tahun)	KBKR
5	Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga	1	Indeks Pembangunan Keluarga (Bangga)	Indeks (Skala 0-100)	Pengukuran perbandingan dari kualitas keluarga untuk semua wilayah di Indonesia, serta mengklasifikasikan suatu wilayah dengan status pembangunan keluarga maju, berkembang atau rentan	Nilai Komposit dari 3 dimensi dengan mempertimbangkan bobot tertentu, yaitu (a) Dimensi Ketentraman dengan indikator antara lain (1) kegiatan ibadah; (2) legalitas keluarga; (3) jaminan kesehatan; (4) jaminan keuangan; dan (5) keharmonisan keluarga; (b) Dimensi Kemandirian dengan indikator antara lain (1) pemenuhan kebutuhan dasar; (2) keberlangsungan pendidikan; (3) kesehatan keluarga; (4) akses informasi; (c) Dimensi Kebahagiaan dengan indikator antara lain (1) interaksi keluarga; (2) interaksi sosial Formula IBangga: Bangga = 1/3 (Indeks ketentraman + Indeks kemandirian + Indeks kebahagiaan) x 100	Tahunan	Pendataan Keluarga/ Susenas	Pendataan Keluarga dan SDKI dilaksanakan 5 tahunan (Updating PBDKI setiap tahun)	KSPK
6	Meningkatnya Median Usia Kawin Pertama Perempuan	1	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	Tahun	Umur dimana dari semua wanita pada kelompok umur 10-49 tahun sudah kawin	Umur dimana median atau 50 persen dari semua wanita kelompok umur 10-49 tahun yang sudah kawin $M_d = X_1 + \left(\frac{F(X_0) - F(X_1)}{F(X_2) - F(X_1)} \right) i$	Tahunan	Pendataan Keluarga/SDKI	Pendataan Keluarga dan SDKI dilaksanakan 5 tahunan (Updating PBDKI setiap tahun)	KSPK
7	Meningkatnya Pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana diseluruh tingkatan wilayah	1	Jumlah keluarga yang melaksanakan pengasuhan dan pendampingan pembentukan karakter	Keluarga	Keluarga anggota BKB hadir pertemuan BKB, mendapatkan materi Menjadi Orangtua Hebat dan menggunakan Kartu Kembang Anak (KKA)	$\sum \text{Keluarga anggota BKB hadir pertemuan BKB, mendapatkan materi Menjadi Orangtua Hebat dan menggunakan Kartu Kembang Anak (KKA)}$	BULANAN/ TAHUNAN	SIGA/DALAP		DITBALNAK
		2	Jumlah PIK Remaja dan BKR yang mendapat pembinaan GenRe	PIK Remaja dan BKR	Jumlah PIK R yang mendapatkan pembinaan yang ditunjukkan dengan adanya dukungan anggaran dan cakupan laporan kegiatan PIK R pada aplikasi SIGA (R/I/PIK R)	Jumlah PIK R yang mendapatkan pembinaan yang ditunjukkan dengan adanya dukungan anggaran dan cakupan laporan kegiatan PIK R pada aplikasi SIGA (R/I/PIK R)	Bulanan	SIGA		DITHANREM
		3	Jumlah Keluarga yang mengakses PPKS	Keluarga	Keluarga yang mendapatkan pelayanan di PPKS	Jumlah keluarga yang mendapatkan pelayanan di PPKS selama tahun berjalan	Tahunan	New SIGA/ Laporan Internal Ditarian		DITHANLAN
		4	Persentase Kabupaten/kota yang melaksanakan kegiatan usaha ekonomi keluarga	Persen	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan kegiatan usaha ekonomi keluarga yang ditunjukkan dengan adanya dukungan anggaran dan cakupan laporan kegiatan UPPKS pada aplikasi SIGA (R/I/UPPKS)	$\frac{\sum \text{kabupaten kota yang melaporkan melalui SIGA (formulir RI/UPPKS)}}{\sum \text{seluruh kabupaten kota}} \times 100\%$	Bulanan/ Tahunan	SIGA/DALAP		DITPEMKON
		5	Jumlah Pemerintah Daerah yang memanfaatkan GDPK dalam penetapan parameter kependudukan pada perencanaan pembangunan daerah	Pemerintah Daerah Provinsi dan Kab/Kota	Jumlah Pemerintah Daerah yang memanfaatkan GDPK dalam penetapan parameter kependudukan pada perencanaan pembangunan daerah	$\sum \text{Pemerintah Daerah Provinsi dan Kab/Kota yang memanfaatkan GDPK dalam penetapan parameter kependudukan pada perencanaan pembangunan}$	Tahunan	Laporan eMove		DITRENDUK
		6	Jumlah Rumah Data Kependudukan Paripurna yang terbentuk di Kampung KB	Rumah Dataku di Kampung KB	Rumah Data Kependudukan dan Informasi Keluarga (Rumah DataKu) yang telah memiliki SK Pengukuhan, telah mengikuti oriasi, mempunyai lebih dari 2 jenis sarana dan prasarana, memiliki data lebih dari 3 jenis data, penyajian lengkap dan datanya telah dimanfaatkan.	$\sum \text{Kampung KB yang memiliki Rumah Data Kependudukan dan Informasi Keluarga (Rumah Dataku) dengan klasifikasi paripurna}$	Tahunan	Laporan eMove Ditrenduk		DITRENDUK

NO	SASARAN KINERJA	NO	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Penjelasan Definisi Umum	Rumus Perhitungan Indikator Kinerja	Periode Waktu Pengukuran Indikator Kinerja	SUMBER DATA PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN	UNIT KERJA SUMBER DATA PENANGGUNG JAWAB PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA
		7	Jumlah Kelompok Kerja Bangsa Kencana Provinsi dan Kab/Kota yang efektif	Prov & Kab/Kota	1. Tim Kelompok Kerja yang efektif dalam rangka memfasilitasi dan mengadvokasi Program Bangsa Kencana kepada stakeholder di tingkat provinsi dan kabupaten/kota sehingga dapat memperkuat komitmen terhadap Program Bangsa Kencana 2. Efektivitas Tim Kelompok Kerja dilihat dari keberhasilan pada peningkatan skor IPBK, memiliki GDPK, mengintegrasikan indikator urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) atau Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah, serta terbentuknya kelembagaan yang menangani urusan PPKB secara utuh 3. Secara kumulatif	Σ Kelompok Kerja Bangsa Kencana Prov dan Kab/Kota yang efektif	Tahunan	Laporan Khusus Unit Kerja		DITJAKDUK
		8	Cakupan implementasi pendidikan kependudukan di provinsi	Jalur (formal, nonformal, dan informal)	Cakupan penyelenggaraan kerjasama pendidikan kependudukan dalam hal penguatan sistem, pengembangan materi dan pembinaan dalam rangka pengintegrasian materi pendidikan kependudukan melalui jalur pendidikan formal, non formal dan informal Jalur pendidikan formal: a. Sekolah Slaga Kependudukan (SSK) b. Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan Jalur pendidikan nonformal: a. Penerapan ASN peduli kependudukan melalui diklat struktural/teknis pada balai diklat daerah b. Penerapan Saka Kencana Kepramukaan melalui materi kependudukan pada jenjang kepramukaan Jalur pendidikan informal: Penyiapan materi untuk poktan (BKB, BKL, BKR), tokoh masyarakat, tokoh agama, maupun kelompok kegiatan lainnya serta penyiapan Pojok kependudukan di Kampung KB	Σ Implementasi kerjasama pendidikan kependudukan di provinsi	Semesteran	Laporan E-Monev	3 jalur (formal, nonformal dan informal)	DITPENDUK
		9	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk	Prov & Kab/Kota	Pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) yang melaksanakan rangkaian proses pengumpulan dan analisis data, serta diseminasi informasi tentang dampak pengendalian penduduk untuk memperkirakan potensi atau masalah kependudukan yang akan datang.	Σ pemerintah daerah yang melaksanakan Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk	Tahunan	Aplikasi Siperindu; Laporan Khusus Unit Kerja		DITDAMDUK
		10	Jumlah Kampung KB yang melaksanakan penanganan terpadu isu kependudukan	Kampung KB	Jumlah Kampung KB menurut keterlibatan lintas sektor dibandingkan dengan jumlah seluruh Kampung KB	Σ Kampung KB yang melaksanakan penanganan terpadu isu kependudukan	Tahunan	Aplikasi Kampung KB; Laporan Khusus Unit Kerja		DITDAMDUK
		11	Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	Persen	Perbandingan faskes yang siap melayani KB MKJP (dilihat dari kesiapan SDM, ketersediaan sarana, dan ketersediaan alokasi) dibandingkan dengan total faskes yang teregister di BKKBN Catatan : - MKJP adalah metode yang mencakup IUD, Implan, MOW, MOP. - Faskes adalah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang teregister di BKKBN yangutamakan memberikan pelayanan IUD dan Implan - Ketersediaan SDM adalah tersedianya dokter/bidan yang mendapatkan pelatihan IUD dan Implan (Sumber data : K/O/KB) - Ketersediaan Sarana adalah tersedianya sarana di faskes minimal IUD kit dan Implan removal kit (Sumber data : K/O/KB) - Ketersediaan Alokasi adalah tersedianya alokasi di faskes minimal IUD dan Implan (Sumber data F/II/KB atau R/II/KB)	$\frac{\Sigma \text{Faskes yang tersedia SDM, sarana dan alokasi untuk melayani KB MKJP}}{\Sigma \text{Faskes KB yang teregister di BKKBN}} \times 100\%$	Triwulan/ Tahunan	Laporan statistik rutin (K/O/KB dan F/II/KB) atau SIGA (K/O/KB dan R/II/KB)		DITSESYAN KB
		12	Indeks Informasi Metode KB (Method Information Index/MI)	Indeks (Skala 0-100)	Penilaian komposit dari Informasi tentang metoda/jenis kontrasepsi, efek samping dan yang dilakukan jika terjadi efek samping. Untuk provinsi sebagai alternatif proksi MI menggunakan cakupan informed consent MKJP (masuk dalam variabel Pendataan Keluarga 2020)	Σ (Indeks komposit variabel "Informasi tentang metoda/jenis kontrasepsi" + "Efek samping" + "Yang dilakukan jika terjadi efek samping")	Tahunan	Pendataan Keluarga		DITTAS
		13	Persentase kesertaan KB di Kabupaten/Kota dengan kesertaan rendah	Persen peserta KB	Jumlah peserta KB di kabupaten/kota dengan kesertaan rendah dibandingkan Jumlah PUS di Kabupaten/Kota dengan Kesertaan Rendah (Kab/Kota dengan CPR dibawah CPR Provinsi) dikalikan 100	$\frac{\Sigma \text{jumlah peserta KB di Kabupaten atau Kota dengan Kesertaan Rendah}}{\Sigma \text{jumlah PUS di Kabupaten atau Kota dengan kesertaan rendah}} \times 100\%$				DITYANSUS
		14	Persentase Kehamilan Yang Tidak Diinginkan	Persen	Perbandingan jumlah ibu yang tidak ingin anak lagi maupun yang ingin hamil nanti/kemudian terhadap jumlah ibu yang saat ini sedang hamil	$\frac{\Sigma \text{ibu hamil yang tidak ingin anak lagi maupun yang ingin hamil nanti/kemudian}}{\Sigma \text{ibu hamil di tahun berjalan}} \times 100\%$	Tahunan	Pendataan Keluarga	Pendataan Keluarga dan SDKI dilaksanakan 5 tahunan (Updating PBDKI setiap tahun)	DITKEPSRO

NO	SASARAN KINERJA	NO	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Penjelasan Definisi Umum	Rumus Perhitungan Indikator Kinerja	Periode Waktu Pengukuran Indikator Kinerja	SUMBER DATA PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN	UNIT KERJA SUMBER DATA PENANGGUNG JAWAB PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA
15	Persentase Pelayanan KB Pascapersalinan		Persentase Pelayanan KB Pascapersalinan	Persen	KB pascapersalinan merupakan upaya pencegahan kehamilan dengan menggunakan kontrasepsi segera setelah melahirkan sampai dengan 42 hari / 6 minggu setelah melahirkan. Alat dan obat kontrasepsi yang digunakan antara lain IUD, implan, tubektomi, pil dan suntikan	$\frac{\sum \text{Ibu yang dilayani KB pascapersalinan}}{\sum \text{Ibu melahirkan di tahun berjalan}} \times 100\%$	Tahunan/Bulanan	Statistik Rutin/ Laporan Dirkes Prov	Pendataan Keluarga dilaksanakan 5 tahunan (Updating PBKDI setiap tahun)	DITKESPRO
16	Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja yang berperan serta aktif dalam pengelolaan Program Bangga Kencana		Stakeholder/ Mitra	Stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja yang telah menandatangani kerjasama dengan melaksanakan minimal 30 persen kegiatan yang tercantum dalam ruang lingkup MoU dan membentuk kelembagaan dinas pengendalian penduduk dan KB di Kab/Kota berupa dinas utuh	Σ MoU yang ditandatangani + jumlah kelembagaan utuh di Kab/Kota	Tahunan	Laporan Khusus Unit Kerja	kumulatif per tahun	DITHUBGA	
17	Persentase masyarakat yang terjangkau Program Bangga Kencana		Persen	masyarakat (PUS, WUS, Remaja) yang memperoleh informasi Program Bangga Kencana dengan cara mendengar, memperoleh/melihat informasi Program Bangga Kencana melalui media dan Petugas. A) Sumber Media : Media Online/ Media Sosial, Media Massa Elektronik, Media Massa Cetak, Media Promosi Cetak dan Elektronik dalam/luar ruangan, Media Tatap Muka, Media Tradisional, Public Figure. B) Petugas: Pejabat Pemerintah, Petugas KB, Guru/Dosen, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Dokter, Bidan/Perawat, Perangkat Desa/Kelurahan, Kader, IMP dan lainnya	Σ Indeks (cakupan informasi yang diperoleh dari Media + Petugas)	Tahunan	SKAP dan Pendataan Keluarga		DITKOMIDU	
18	Persentase Penyuluh KB yang berkinerja baik		Persen	Banyaknya Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB yang melakukan kegiatan Penyuluhan dan non Penyuluhan di wilayah binaan dalam rangka mengelola Program Bangga Kencana dengan nilai kinerja minimal 76% setiap bulannya melalui aplikasi e-vision, dimana Penilaian Skor: s 50 (sangat kurang), 51-60 (kurang), 61-75 (cukup), 76-90 (baik), dan 91-100 (sangat baik)	$\frac{\sum \text{Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB dengan nilai kinerja minimal 76\% (kegiatan penyuluhan dan non penyuluhan)}}{\sum \text{Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB}} \times 100\%$	Bulanan/ Tahunan	Sumber data E-VISUM E-SKP		DITLULAP	
19	Jumlah pengelolaan Sistem Informasi Keluarga (SIGA)		Kab/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan pengelolaan data rutin melalui New SIGA	Σ Kabupaten/Kota yang melaksanakan pengelolaan data rutin melalui New SIGA	Tahunan/Bulanan	New SIGA	Verifikasi dan validasi data dilaksanakan satu tahun sekali	DITLAPTIK	
20	Persentase cakupan perangkat dan jaringan sistem Teknologi dan Informasi di Tk. Provinsi dan Kabupaten/Kota		Persen Wilayah Prov dan Kab/Kota	Tersedianya perangkat dan sistem layanan teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung Program Bangga Kencana diseluruh tingkatan wilayah	$\frac{\sum \text{Jumlah Perwakilan BKKBN Prov, OPD Prov, Kab dan Kota yang menyediakan perangkat jaringan IT}}{\sum \text{Perwakilan dan Semua OPD Prov Kabupaten dan Kota}} \times 100\%$	Bulanan/ Tahunan	Laporan Khusus		DITTEKDA	
21	Jumlah pemerintah daerah yang mendapatkan fasilitas penetapan data parameter pembangunan Keluarga, kependudukan dan Keluarga berencana untuk perencanaan dan evaluasi daerah pembangunan.		Pemerintah Daerah	Cakupan pemerintah daerah yang mendapatkan fasilitas penetapan data parameter pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana untuk perencanaan dan evaluasi daerah pembangunan	Σ Pemerintah daerah yang mendapatkan fasilitas penetapan data parameter pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana untuk perencanaan dan evaluasi daerah pembangunan	Tahunan	Laporan E-Monev Ditrenduk		DITRENDUK	
22	Jumlah Keluarga dengan baduta yang mendapatkan fasilitas pembinaan 1000 HPK		Keluarga	Keluarga yang memiliki baduta yang mendapatkan promosi dan KIE Pengasuhan 1000 HPK	Σ Keluarga yang mendapatkan promosi dan KIE pengasuhan 1000 HPK pada lokus prioritas stunting / Σ jumlah keluarga baduta yang berada pada lokus prioritas) x 100%	Tahunan	Smart DJA		DITBALNAK	
23	Jumlah PIK Remaja dan BKR yang mendapat fasilitas pembinaan Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu		PIK Remaja dan BKR	Jumlah Kelompok Kegiatan PIK R dan BKR yang menjadi lokus Pro PN PKBR yang mendapatkan fasilitas pembinaan edukasi dan Kespro oleh Perwakilan Provinsi	Jumlah Kelompok PIK R dan BKR lokus Pro PN tahun 2022	Bulanan	e Monev Bappenas/ SMART/ SIGA		DITHANREM	
24	Jumlah Kelompok BKL yang mendapat fasilitas pembinaan Pelayanan Ramah Lansia		Kelompok BKL	Kelompok BKL yang melaksanakan 7 dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang	Jumlah kelompok BKL yang melaksanakan 7 (Tujuh) Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Perawatan Jangka Panjang Bagi Lansia dan di laporkan melalui R/IBKL pada Sistem Informasi Keluarga (New SIGA)	Tahunan	New SIGA		DITHANLAN	
25	Jumlah Kelompok UPPKA percontohan di Kampung KB yang mendapat fasilitas dan pembinaan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga		Kelompok UPPKA	Jumlah Kelompok UPPKA di wilayah Provinsi DKI Jakarta yang mendapat fasilitas pembinaan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga, meliputi kegiatan yang dilaksanakan dalam Program Prioritas Nasional (Pro-PN) peningkatan pemberdayaan ekonomi keluarga akseptor Lestari MKJP dan keluarga akseptor Mandiri MKJP di kampung KB yaitu: 1. Perbanyak materi dan media KIE serta pengembangan materi sesuai karakteristik lokal 2. Sosialisasi materi dan media KIE Pemberdayaan Ekonomi Keluarga akseptor 3. Orientasi Pemberdayaan Ekonomi keluarga akseptor 4. Fasilitas pemberdayaan ekonomi keluarga akseptor 5. Pengembangan PEK melalui strategi jenis usaha dalam rangka mendukung pencegahan stunting.	Jumlah Kelompok UPPKA yang mendapat fasilitas pembinaan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga di kampung KB	Bulanan/ Tahunan	Laporan Unit Kerja		DITPEMKON	
26	Jumlah Rumah data kependudukan paripurna di kampung KB yang mendapat fasilitas pembinaan		Kampung KB	Jumlah Rumah data kependudukan paripurna yang difasilitasi di kampung KB	Σ Kampung KB yang mendapatkan Fasilitas dalam pengembangan Rumah Data Kependudukan dan Informasi Keluarga (Rumah Dataku) menjadi baik/ikasi paripurna	Tahunan	Laporan eMonev		DITRENDUK	
27	Kampung KB yang mendapat fasilitas Intensifikasi dan Ekstensifikasi kegiatan Bangga Kencana		kab/kota	Jumlah kabupaten/kota yang kampung KB nya telah mendapat fasilitas intensifikasi dan ekstensifikasi kegiatan Bangga Kencana, yaitu dengan bimbingan teknis dari pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun mitra terkait untuk meningkatkan kuantitas maupun kualitas kegiatan Bangga Kencana di Kampung KB dalam rangka menuju Kampung KB mandiri	Σ kabupaten/kota yang kampung KB nya telah mendapat fasilitas intensifikasi dan ekstensifikasi kegiatan Bangga Kencana	Tahunan	Aplikasi Kampung KB; Laporan Khusus Unit Kerja		DITDAMDUK	

NO	SASARAN KINERJA	NO	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Penjelasan Definisi Umum	Rumus Perhitungan Indikator Kinerja	Periode Waktu Pengukuran Indikator Kinerja	SUMBER DATA PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN	UNIT KERJA SUMBER DATA PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA
		28	Jumlah Faskes yang mendapat pemenuhan ketersediaan Alokon	Faskes	Faskes baik FKTP maupun FKRTL yang terregistrasi di BKKBN yang mendapatkan ketersediaan pemenuhan alokon	\sum FKTP dan FKRTL yang terregistrasi yang mendapatkan pemenuhan ketersediaan alokon	Tahunan	Laporan Unit Kerja		DITAKSES
		29	Kampung KB yang mendapat fasilitasi pemberdayaan dalam rangka penurunan stunting	kab/kota	Jumlah kabupaten/kota yang Kampung KB nya telah mendapatkan fasilitasi/pembinaan/bimbingan teknis pemberdayaan oleh pemerintah daerah maupun mitra terkait dalam rangka penurunan dan pencegahan stunting, misalnya pemberdayaan kelompok masyarakat di Kampung KB.	\sum kabupaten/kota yang Kampung KB nya telah mendapatkan fasilitasi pemberdayaan oleh pemerintah daerah maupun mitra terkait dalam rangka penurunan dan pencegahan stunting	Tahunan	Aplikasi Kampung KB; Laporan Khusus Unit Kerja		DITDAMDUK
		30	Jumlah Rekomendasi kebijakan hasil Studi Kasus Stunting provinsi	rekomendasi kebijakan	Jumlah rekomendasi kebijakan tentang pengembangan kegiatan percepatan penurunan stunting yang diperoleh berdasarkan hasil kajian atas studi kasus stunting dan pembelajaran implementasi kegiatan percepatan penurunan stunting	\sum rekomendasi kebijakan pengembangan kegiatan percepatan penurunan stunting berdasarkan studi kasus dan pembelajaran kegiatan percepatan penurunan stunting	Tahunan	Laporan Khusus Unit Kerja		DITDAMDUK
		31	Pelaksanaan layanan Audit Stunting, Manajemen Kasus Stunting Kab/Kota, dan koordinasi Intensifikasi pelayanan KB di faskes	Kab/Kota	Kegiatan pertemuan membahas kasus-kasus stunting dengan tingkat kesulitan tinggi yang ditemukan selama proses pendampingan keluarga untuk mendapatkan solusi yang responsif dari nara sumber/para pakar sekaligus melakukan koordinasi Intensifikasi pelayanan KB di faskes	\sum Kabupaten/Kota yang melakukan layanan Audit Stunting, Manajemen Kasus Stunting Kab/Kota, dan koordinasi Intensifikasi pelayanan KB di faskes	Tahunan	Laporan Unit Kerja		DITTAS
		32	Jumlah Penyelenggaraan koordinasi satgas Percepatan Penurunan Stunting Provinsi dan kab/kota	Kegiatan	Jumlah kegiatan penyelenggaraan koordinasi yang dilakukan oleh Satgas dalam pengawasan percepatan penurunan stunting oleh Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi dan Kabupaten/Kota	\sum kegiatan koordinasi Satgas Provinsi dan Kab/Kota	Tahunan	Laporan Kegiatan		DITLULAP
		33	Jumlah Data kasus stunting dan keluarga resiko stunting yang terverifikasi	Layanan	Dokumen/Laporan cakupan hasil verifikasi data kasus stunting dan keluarga resiko stunting pada Desa/Kelurahan yang menjadi target	Dokumen yang memuat cakupan hasil verifikasi data kasus stunting dan keluarga resiko stunting pada Desa/Kelurahan yang menjadi target $\frac{\sum \text{Desa kebrhasilan melakukan verifikasi data kasus stunting dan keluarga resiko stunting}}{\sum \text{target jumlah Desa Kelurahan}} \times 100\%$	Tahunan	New SIGA / Pendataan Keluarga	Pencatatan dan Pelaporan data rutin melalui New SIGA dilaksanakan setiap bulan	DITLAPTIK
		34	Jumlah Kampanye Percepatan Penurunan Stunting tingkat Provinsi dan kab/kota yang dilaksanakan	Layanan	Kampanye yang dilakukan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagai upaya KIE dalam perubahan perilaku pencegahan stunting melalui 3 layanan: 1. Kampanye tingkat provinsi 2. Kampanye tingkat kab/kota 3. Promosi & KIE Program Percepatan Penurunan Stunting di Wilayah Khusus	\sum Layanan Kampanye Provinsi dan Kabupaten Kota	1 tahun	Rekap Laporan Provinsi		DITKOMIDU
		35	Jumlah Layanan Pemutakhiran basis data keluarga Indonesia (PBDKI)	Layanan	Layanan pemutakhiran basis data keluarga Indonesia pada Kabupaten/Kota sesuai dengan target jumlah keluarga	Jumlah Kabupaten/Kota yang melakukan pemutakhiran basis data keluarga sesuai target jumlah KK	Tahunan	Pendataan Keluarga	PBDKI dilaksanakan satu tahun sekali	DITLAPTIK
8	Meningkatnya penyelenggaraan kegiatan pelatihan, penelitian dan pengembangan di Provinsi	1	Persentase peserta Diklat yang lulus dengan kategori baik dan sangat baik	Persen	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti Pendidikan atau Pelatihan klasikal maupun non klasikal dan lulus dengan kategori baik dan sangat baik	$\frac{\sum \text{SDM aparatur yang mengikuti diklat dan lulus dengan kategori baik dan sangat baik}}{\sum \text{SDM aparatur yang mengikuti diklat}} \times 100\%$	Tahunan	Laporan Khusus Unit Kerja	Kualifikasi kelulusan peserta Diklat ditetapkan sbb: • Sangat baik (skor 90,01 - 100) • Baik (skor 80,01 - 90,0) • Cukup baik (skor 70,01 - 80,0) • Kurang Memuaskan (skor 60,01 - 70,0) • Tidak Memuaskan (skor < 60)	PUSDIKLAT KKB
		2	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana yang digunakan sebagai input rumusan Kebijakan Program Bangsa Kencana di Provinsi	Laporan	Kegiatan penelitian dan pengembangan Program Bangsa Kencana yang menggunakan data primer maupun data sekunder, termasuk kegiatan penelitian dan pengembangan baik melalui penelitian operasional atau penelitian lainnya dalam rangka mengukur kinerja Program atau intensifikasi pengembangan Program Program Bangsa Kencana, dilakukan baik secara mandiri swakelola atau dengan mitra penelitian.	Banyaknya penelitian dan pengembangan Program Bangsa Kencana yang menggunakan data primer maupun data sekunder yang telah selesai sampai diseminasi	Tahunan/ Triwulanan	Laporan Khusus Unit Kerja		PUSNA/PUSDU
		3	Jumlah SDM eksternal yang mendapatkan Pelatihan dan Refreshing dalam rangka percepatan penurunan stunting	Orang	Jumlah tenaga program yang mengikuti pelatihan dan refreshing baik dalam bentuk klasikal maupun non klasikal dalam rangka percepatan penurunan stunting	\sum Tenaga program yang mengikuti pelatihan dan refreshing baik dalam bentuk klasikal maupun non klasikal dalam rangka percepatan penurunan stunting	Tahunan	Laporan Khusus Unit Kerja		PUSDIKLAT KKB
9	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan manajemen dalam pengelolaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana di Provinsi	1	Dukungan Manajemen di Provinsi (termasuk gaji/001 dan pemeliharaan rutin/002)	Bulan	Dukungan dalam melaksanakan fungsi manajemen organisasi dan tata laksana di Provinsi	Jumlah bulan dalam memberikan layanan Dukungan Manajemen di Provinsi	Bulanan dan Tahunan	Laporan Internal		BIRUMAS
		2	Jumlah kegiatan penyelenggaraan sekretariat percepatan penurunan stunting provinsi	Kegiatan	Jumlah kegiatan penyelenggaraan fasilitasi kegiatan pertemuan dan rapat-rapat koordinasi bersama mitra terkait Percepatan Penurunan Stunting	\sum Kegiatan fasilitasi Sekretariat Percepatan Penurunan Stunting Provinsi	Bulanan dan Tahunan	Laporan Khusus Unit Kerja		BIREN
		3	Jumlah layanan humas percepatan penurunan stunting tingkat provinsi	Layanan	Jumlah layanan humas dan publikasi dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting	Jumlah kumulatif kegiatan humas dan publikasi dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting	Tahunan	Laporan Khusus Unit Kerja		BIRUMAS
10	Mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan pengawasan lainnya di provinsi	1	Indeks ZI WBK	Indeks	Unit kerja berpredikat WBK merupakan perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan sebagai miniatur pelaksanaan reformasi birokrasi. Penilaian WBK terdiri dari aspek proses (6 area perubahan yaitu manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan dan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik) dan aspek hasil (peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik).	Indeks penilaian ZI WBK/WBBM atas 6 area perubahan dari Tim Penilai Internal (Inspektorat Utama BKKBN)	Tahunan	Laporan Hasil Penilaian ZI WBK/WBBM dari TPI Inspektorat Utama BKKBN	Bagi Provinsi yang belum memperoleh Predikat WBK dari Kempenan RB sampai dengan Tahun 2021, yaitu: Provinsi Aceh, Bali, Banten, Bengkulu, DIY, Gorontalo, Jambi, Kalbar, Kalsel, Kalteng, Kaltim, Kepri, Lampung, Maluku, Maluku, NTB, NTT, Papua, Papua Barat, Riau, Sulbar, Sulsel, Sultra, Sulut, Sumsel, Sumut	ITWIL
		2	Jumlah Layanan Pengawasan Kegiatan Percepatan Penurunan Stunting tk provinsi	Dokumen	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Program Percepatan Penurunan Stunting yang dilakukan selama 1 tahun anggaran.	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Program Percepatan Penurunan Stunting yang telah dihasilkan	Tahunan	Laporan Hasil Evaluasi		ITWIL